

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan pesta demokrasi tertinggi di tingkat daerah yang merupakan upaya untuk memilih kepala daerah secara langsung atau biasa disebut Pilkada. Pilkada diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, berisi tentang pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang dipilih secara langsung. Pilkada secara langsung dilakukan pertama kali pada pertengahan Tahun 2005. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikannya hak bagi rakyat untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi kepala daerah, hal itu berbeda dengan periode sebelumnya yang mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Tujuan Pilkada secara langsung yaitu terbentuknya tatanan politik lokal yang demokratis serta sistem pemerintahan yang berjalan efektif. Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan demokratis dan berkualitas dari sisi proses apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis; aman, tertib, lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasil, pemilu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping dapat juga mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional¹.

Sejak Tahun 2015 di Indonesia Pilkada yang mulanya tiap daerah berbeda kapan pelaksanaannya, dijadikan serentak untuk yang masa jabatan selesai di Tahun 2015 dan 2016 awal. Pertama kali Pilkada serentak diikuti oleh 9 Provinsi salah satunya Jawa Timur, Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang melaksanakan

¹ Abdullah, Rozali (2009) Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Pilkada serentak pertama di Tahun 2015 salah satunya yaitu Surabaya dan akan diadakan Pilkada kembali di Tahun 2020.

Banyak hal yang memengaruhi keberlangsungan pemilu, salah satunya yaitu Organisasi Masyarakat. Khususnya Ormas keagamaan karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama. Meskipun Agama bukan menjadi ideologi Negara Indonesia melainkan masuk ranah privat individu tetapi negara melindungi segala kepentingan individu. Salah satu Ormas Keagamaan di Indonesia yaitu Nadlatul Ulama. Berdasarkan hasil survei lingkaran survei Indonesia pada Tahun 2019 NU merupakan Ormas terbesar di Indonesia. Dengan 1200 responden yang mana presentase muslim 87,8% presentase warga NU sebanyak 49,5%². Memiliki basis massa yang besar kurang lebih 108 Juta orang membuat NU memiliki pengaruh. Khususnya dalam proses perebutan kekuasaan dalam hal ini NU seringkali menjadi rebutan para petarung di panggung politik.

Jawa Timur yang menjadi basis massa Nahdlatul Ulama terbesar di Indonesia dinilai dapat memberikan dukungan dalam Pilkada di beberapa wilayah. Warga NU di Kota Surabaya jumlahnya memang tidak sebanyak beberapa daerah di Jawa Timur tetapi hal itu bukan berarti NU tidak memiliki pengaruh, Gus Solah memprediksi NU di Kota Surabaya menjadi penentu Pilkada Kota Surabaya, beliau berkata jika ada kandidat yang merepresentasikan NU, akan berpeluang besar memenangi Pilkada Kota Surabaya 2020. Meski begitu bukan berarti kandidat dari kalangan nasionalis tidak berpeluang. Kalau kandidat nasionalis ini ketokohnya kuat, bisa jadi memenangkan Pilkada Kota Surabaya 2020.³ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai afiliasi warga NU dalam berpolitik tentunya juga memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan di Indonesia khususnya Surabaya sendiri.

² Suara Investor (2020, Februari) Survei LSI Denny JA : NU sebagai Ormas Terbesar yang Tak Tertandingi diakses pada 2 Juli 2021 melalui laman <https://www.suarainvestor.com/survei-lsi-denny-ja-nu-sebagai-ormas-terbesar-yang-tak-terdandingi/>

³ Liputan6.com (2019, Juli) Gus Solah Nilai Warga NU Penentu Pilkada Kota Surabaya 2020 diakses pada Tanggal 9 Juni 2020 dari <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4018297/gus-solah-nilai-warga-nu-penentu-pilkada-kota-surabaya-2020>

PKB sebagai partai politik yang lahir dari rahim NU, meski bukan struktural NU juga sudah mewarnai panggung kontestasi pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilu sejak tahun 1999⁴. DPC PKB Kota Surabaya sendiri pada kesempatan Pilwali Kota menentukan sikap untuk mengusung dan mendukung salah satu calon yaitu Machfud Arifin dan Mujiaman seperti yang telah disampaikan oleh Musyafak Rouf selaku ketua DPC PKB Kota Surabaya⁵. Berbeda dengan PCNU Surabaya yang diduga telah berafiasi politik dengan pasangan Eri Cahyadi dan Armudji dan menimbulkan polemik juga karena dianggap melanggar AD-ART Organisasi⁶. Begitu juga dengan beberapa badan otonom NU lainnya di Kota Surabaya. Seperti Muslimat NU Kota Surabaya diungkapkan oleh Ketua Muslimat Lilik Fadilah yang mengatakan siap untuk memenangkan pasangan Machfud Arifin dalam Pilwali Kota Surabaya Tahun 2020⁷. Gerakan Pemuda Ansor menyatakan bahwa Machfud Arifin adalah sosok yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk memimpin Kota Surabaya disampaikan oleh ketua GP Ansor Surabaya Faridz Afif⁸. Sedangkan Fatayat NU Kota Surabaya yang bergerak di bidang pengembangan perempuan mendeklarasikan dukungannya untuk Eri Cahyadi karena memnuhi kriteria pemimpin dan bisa meneruskan kebaikan Bu Risma, dideklarasikan di Hotel Mercure pada Minggu 23 Agustus 2020⁹, tetapi

⁴ Tribunnews (2020, Februari) NU-PKB Satu Kesatuan: Menafsir Status PKB dalam Perspektif Khittah NU diakses pada tanggal 29 Juli 2021 <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/02/04/nu-pkb-satu-kesatuan-menafsir-status-pkb-dalam-perspektif-khitthah-nu>.

⁵ Tribunnews Surabaya (2020, Maret) DPC PKB Surabaya Bulat Mengusung Machfud Arifin Dalam Pilwali Surabaya diakses pada Tanggal 30 Juli 2021 melalui laman <https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/03/dpc-pkb-surabaya-bulat-mengusung-machfud-arifin-dalam-pilwali-surabaya>

⁶ Jatim Now (2020, September) Histeria Pilwali, Pengurus PCNU Surabaya 2015-2020 Diminta Dibekukan diakses pada tanggal 30 Juli 2021 melalui laman <https://jatimnow.com/baca-29560-histeria-pilwali-pengurus-pcnu-surabaya-20152020-diminta-dibekukan>

⁷ Radar Surabaya (2020, Juni) Muslimat NU Dukung Machfud Arifin di Pilwali Surabaya diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui laman <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/06/07/197906/muslimat-nu-dukung-machfud-arifin-di-pilwali-surabaya>

⁸ Liputan 6 (2020, Juni) GP Ansor Surabaya Dukung Machfud di Pilkada 2020 diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui laman <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2856884/gp-ansor-surabaya-dukung-machfud-di-pilkada-2020>

⁹ Jawa Pos (2020 Agustus) Giliran Fatayat NU se-Surabaya Beri Dukungan ke Eri Cahyadi diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui laman <https://www.jawapos.com/surabaya/23/08/2020/giliran-fatayat-nu-se-surabaya-beri-dukungan-ke-eri-cahyadi/>

Fatayat NU tidak satu suara ada yang mendukung dan memenangkan Machfud Arifin di Pilwali Kota Surabaya diungkapkan langsung oleh Camelia Habibah Ketua Fatayat NU Kota Surabaya. Selain itu ada Forum silaturahmi Bu Nyai se-Surabaya yang mendukung Eri Cahyadi dan diikuti majelis taklim se-Surabaya.

Selain dari Badan Otonom NU atau lembaga-lembaga NU, Kiai-kiai NU juga silih berganti memberikan dukungan kepada masing-masing calon. Prof. Ali Maschan Moesa dalam acara silaturahmi dan halaqah aswaja mengajak warga nahdliyyin untuk memilih pasangan Machfud Arifin karena dinilai dekat dengan pimpinan agama¹⁰. Selain itu KH. Kemas Abdurrahman dan 8 Kiai lainnya mendukung Eri Cahyadi salah satu alasan karena Ibunda Eri Cahyadi juga berasal dari keluarga pondok pesantren Sidosermo atau 'Ndresmo' yang terkenal sebagai kawasan pesantren di Surabaya¹¹.

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian baik yang meneliti tentang politik elite NU ataupun keterlibatan NU dalam politik praktis serta beberapa penelitian lainnya. Terdapat skripsi yang ditulis oleh Nur Nuzula Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian yaitu Politik Elite Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan adanya keberpihakan oleh elite NU dan keterlibatan Elite NU serta pengaruhnya dalam pemilihan Presiden Tahun 2014.

Selain itu terdapat skripsi oleh Diah Lestari dengan judul Perilaku Politik dan Elite studi tentang pengaruh PWNU pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Terhadap Khittah 1926 mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁰ Jatim Now (2020, November) Para Kiai NU Dukung dan Doakan Machfud Arifin Jadi Wali Kota diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui laman <https://jatimnow.com/baca-31517-para-kiai-nu-dukung-dan-doakan-machfud-arifin-jadi-wali-kota>

¹¹ Berita Satu (2020, September) 9 Kiai NU di Surabaya Doakan Calon Wali Kota Eri Cahyadi diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 melalui laman <https://www.beritasatu.com/nasional/680977/9-kiai-nu-di-surabaya-doakan-calon-wali-kota-eri-cahyadi>

Dalam penelitian ini membahas pula tentang teori elite dan perilaku politik, serta membahas tentang NU secara keorganisasian.

Terdapat pula disertasi yang ditulis oleh Saepulah, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul disertasi 'Politik Identitas Keagamaan Warga Nahdlatul Ulama (NU)' dengan studi kasus di Kabupaten Subang. Fokus penelitian membahas tentang peran NU dalam peta politik, pengaruh NU dalam Pilkada di Kabupaten Subang, dan politik identitas keagamaan warga NU di Kabupaten Subang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saepulah ini dijelaskan secara komprehensif pula tentang NU dalam pusran Politik nasional dan di Kabupaten Subang serta kontribusi NU untuk menjalankan politik kebangsaan.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka terdapat pertanyaan besar bagaimana keterlibatan Nahdlatul Ulama, bagaimana keterlibatan elite Nahdlatul Ulama di dalamnya dan bagaimana keberpihakan NU dan elite NU dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1** Bagaimana keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020?
- 1.2.2** Bagaimana keterlibatan elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020?
- 1.2.3** Bagaimana keberpihakan Nahdlatul Ulama dan Elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu

mengetahui keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020, Mengetahui keterlibatan Elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 dan Mengetahui keberpihakan Nahdlatul Ulama dan Elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mempunyai harapan terhadap penelitian yang dilakukan supaya dapat menjadi sumber manfaat bagi semua pihak.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis mengarah kepada manfaat penelitian di bidang akademis yaitu terkait politik elite. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan informasi keterlibatan dan keberpihakan suatu ormas dalam pemilihan kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan.

- 1) Bagi peneliti:
 - a. Peneliti dapat mengetahui bagaimana keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020
 - b. Peneliti dapat mengetahui bagaimana keterlibatan Elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020
 - c. Peneliti dapat mengetahui keberpihakan Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020
 - d. Peneliti dapat memahami permasalahan yang terjadi sehingga dapat menemukan solusinya di kemudian hari.
- 2) Bagi Institusi:
 - a. Dapat menjadi sumber informasi terkait keterlibatan organisasi masyarakat dan elite organisasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah

- b. Dapat menjadi sumber informasi terkait keberpihakan organisasi masyarakat dan elite organisasi masyarakat dalam kepala daerah
- 3) Bagi Kalangan Masyarakat:
 - a. Dapat menjadi referensi untuk mengetahui keterlibatan Nahdlatul Ulama, Elite Nahdlatul Ulama dan keberpihakan Nahdlatul Ulama dan Elite Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketatanegaraan Indonesia membawa perubahan besar bagi ketatanegaraan di Indonesia, salah satu hasil amandemen tersebut yaitu pengisian jabatan kepala daerah yang berbunyi “Gubernur, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis” begitulah bunyi pasal 18 ayat (4) UUD 1945.¹²

Brian C. Smith (1998) berasumsi bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat demokrasi nasional dengan mengungkapkan tiga alasan, pertama yaitu demokrasi pemerintahan di daerah merupakan ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kedua yaitu pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol bagi perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti-demokratis di dalam suatu pemerintahan yang sentralistis. Ketiga yaitu demokrasi di daerah mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat nasional.¹³ Fakta bahwasanya komunitas di daerah lebih terbatas dan memungkinkan adanya deliberatif demokrasi yang mana terdapat komunikasi

¹² Suharizal. 2011. PEMILUKADA : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 1

¹³ Ibid. Hlm.10

langsung dalam berdemokrasi. Maka dari itu diperlukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk memperbaiki demokrasi skala nasional.

Joko J. Prihantoro mengatakan bahwa: “Pemilihan kepala daerah merupakan proses rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Pilkada merupakan pesta demokrasi tertinggi di daerah yang mana merupakan upaya untuk memilih kepala daerah secara langsung. Landasan hukum Pilkada terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang dipilih secara langsung. Pilkada secara langsung mulai dilakukan pada pertengahan Tahun 2005. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikannya hak bagi rakyat untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi kepala daerah. Dengan tujuan pemilihan umum daerah secara langsung yaitu terbentuknya tatanan politik lokal yang demokratis serta sistem pemerintahan yang berjalan secara efektif.

1.5.2 Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang sering kali disebut sebagai Ormas ialah organisasi yang telah didirikan serta dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang secara sukarela sesuai dengan kesamaan kehendak, kepentingan, aspirasi, kebutuhan, tujuan dan kegiatan agar ikut serta aktif dalam membangun tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila. Organisasi masyarakat selalu dihadapkan pada masalah-masalah selama menjalankan aktivitas ketika mencapai target atau tujuan yang hendak diperoleh yang memerlukan solusi-solusi yang dianggap rasional. Didalam suatu organisasi masyarakat adanya kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, semua aktivitas serta keputusan yang akan diambil selalu merepresentasikan kedua hal tersebut. Individu dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam organisasi mempunyai potensi serta kemampuan

dalam mengontrol proses pengambilan keputusan serta lahirnya suatu kebijakan yang baru¹⁴.

Ormas memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika dan budaya yang ada dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara
(UU Nomor 17 Tahun 2013)

Suara Ormas diperlukan untuk mendulang dukungan karena partai dan tim sukses tidak bisa hanya bergantung dengan dukungan partai. Karena banyak elemen-elemen yang dapat memobilisasi suara salah satunya yaitu Ormas. Terlebih NU sebagai Ormas dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia.

1.5.3 Elite Politik

Elite politik merupakan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan atau proses politik lainnya. Beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang elite politik seperti Pareto dan Mosca yang mana mengartikan elite politik yaitu kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Sementara Robert Michel menambahkan kaitannya dengan elite politik yaitu “Hukum Besi Oligarki” yang mana dalam suatu kelompok yang besar pasti ada individu atau kelompok yang

¹⁴ Agusyanto, Ruddy. 2007. Jaringan Sosial dalam Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo.

lebih kecil yang memiliki kekuatan atau dominan dalam kelompok tersebut. Laswell mengatakan bahwa elite politik itu pluralis artinya bukan sosok yang tunggal, berganti-ganti sesuai dengan tahapan pembuatan keputusan. Bagi Laswell bukan elitnya yang terpenting melainkan situasi yang menentukan elite di dalamnya.

Dinamika elite politik menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karenasifatnya selalu berubah sesuai kondisi zaman dan tidak terikat pada ruang dan waktu, dimana kemudian persoalan elite ini akan selalu berkuat hanya pada kepentingan dan kekuasaan. Dinamika dalam hal konteks politik adalah gerak atau kekuatan politik yang dimiliki dan dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Sedangkan elite politik sendiri dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang secara kuantitas kecil, namun mempunyai akses dan kekuasaan yang mana biasanya menempati lapisan atas dalam masyarakat.

Kedudukan elite menurut Keller yaitu berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya, terdapat suatu logika sederhana mengapa kemudian mereka dinamakan dengan elite tersebut, merasa berhak untuk melakukan sesuatu meskipun hal tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya merepresentasikan konstituen mereka. Bagi elite, kelebihan yang mereka miliki sebagaimana yang dikemukakan oleh Keller, membuat elite menjadi magnet kekuasaan yang berpotensi untuk mampu melakukan segala hal. Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni : (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, (4) perkembangan moral dan keagamaan. Konsekuensinya, kaum elite pun semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom akan elite tersebut. Dalam konteks perpolitikan yang ada didunia, elite yang kini banyak memilih untuk terjun kedalam ranah politik sejatinya bukanlah mereka yang paham akan ilmu-ilmu politik sebagaimana seharusnya dimiliki oleh seorang politisi guna mengelola tata Negara. Bahkan, politik sendiri menjadi magnet yang memikat seluruh kalangan, meskipun mereka sebelumnya bukanlah termasuk sebagai kalangan elite dalam bidang politik.

Di Indonesia, ketertarikan akan dunia politik juga terjadi dalam segala lapisan masyarakat, baik mereka yang sebelumnya bukan berasal dari kalangan elite atau mereka yang sebelumnya memang sudah menjadi elite, baik mereka yang memang berasal dari elite politik sendiri maupun mereka yang berasal dari elite ekonomi/pengusaha, birokrat, teknokrat, sosial bahkan elite agama. Elite politik dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain dapat berupa penentuan kebijakan atau dalam tahapan sebelumnya yaitu menentukan siapa yang akan menjadi penentu kebijakan dan orang yang berkuasa di tatanan pemerintahan.

1.6 Kerangka Teori

Teori Elite Politik

Elite menurut Suzanne Keller, berasal dari kata *ellegere*, yang berarti memilih, atau yang berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, serta kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Elite secara umum meujuk pada sekelompok orang di dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah bagian dari kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya¹⁵.

Perbedaan yang tidak dapat dihindari diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya menjadi awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh

¹⁵ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1995,hlm.33

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan pemikir yang tergolong dalam elite theorists, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada disuatu masyarakat.

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elite, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang muasik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elite yang tiak memerintah (non governign elite)

Kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca, dalam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Selanjutnya Suzanne Keller membagi membagi elite menjadi dua golongan. Pertama, bahwa elite yang beranggapan golongan elite itu tunggal yang bisa disebut elite politik. Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada kelompok elite yang berbagi kekuasaan, tanggung jawab dan hak-hak lainnya atau imbalan. Elite itu merupakan suatu kelompok kecil yang mewakili tujuan untuk melanjutkan tatanan sosial di masyarakat.

Asumsi teori elite ini bahwasanya kelompok masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, Kelompok yang memerintah atau elite yang berkuasa. Elite yang berkuasa dimana sekelompok kecil manusia itu memiliki kemampuan dan dapat

memanfaatkan posisi penting tersebut. Kedua yaitu Kelompok yang diperintah. Kelompok elite yang berkuasa biasanya memonopoli kekuasaan dan memegang semua aspek dan fungsi politik itu sendiri. Elite penentu suatu kristalisasi atau suatu perkembangan lebih lanjut dari kelas penguasa. Jadi mereka dapat dianggap bukan setaraf dalam fungsinya tetapi sebagai alternatif-alternatif structural dari kelas-kelas penguasa dan kasta-kasta penguasa, yang mewakili suatu bentuk kepemimpinan sosial yang lebih berspesialisasi dan lebih maju.

Suzanne Keller membagi tipe kepemimpinan menjadi 4 yaitu:

1. Kasta penguasa

Kasta ini menjalankan apa yang dianggap tugas-tugas sosial yang paling penting, membina orang-orangnya melalui reproduksi biologis dan dengan prestise yang paling tinggi. Kasta penguasa dibentuk oleh agama, kekerabatan, bahasa, daerah tempat tinggal, kedudukan ekonomi serta aktivitas-aktivitas jabatan. Kontrol social dipaksakan oleh tata cara agama bukannya melalui suatu badan hukum yang terpusat dan Negara tidak ada atau hanya memainkan peranan yang kecil dalam kehidupan masyarakat.

2. Aristokrasi

Lapisan aristokrasi ini menguasai fungsi-fungsi social yang menentukan dan terbentuk dari ikatan-ikatan keluarga melalui kekerabatan dan kekayaan. Aristokrasi lebih menyukai jabatan-jabatan politik dan perang.

3. Estate pertama

Dapat didapatkan melalui pelaksanaan, perbuatan, pembelian, pengangkatan, dan perkawinan. Jadi status bisa hilang dan diperoleh.

4. Elite-elite penentu

Para spesialis istimewa. Seleksi atas dasar kompetensi perseorangan mencakup pula penyingkiran yang tidak kompeten dan prinsip menghubungkan para elite modern dengan lembaga kepemimpinan primitif dimana kepala suku baik itu pendeta, raja, ataupun prajurit. Asal usul dari elite penentu sebagaimana terdapat pada keadaan semua kelompok berkuasa terletak dalam sifat heterogin masyarakat, dalam jenis kelamin, kesukuan, kecakapan, dan kekuatan. Asal usul kelas sosial terletak dalam pembagian kerja dalam masyarakat.

Dari beberapa pemahaman di atas, Elite politik merupakan seseorang atau kelompok kecil yang dapat mempengaruhi kelompok yang lebih besar baik dalam segi apapun. Penelitian ini akan melihat bagaimana keterlibatan penguus NU dan elite NU dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya serta keberpihakannya dan pengaruhnya kepada warga NU yang lebih besar.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan prosedur yang akan dilakukan ketika penelitian meliputi proses pengumpulan data atau informasi dan analisisnya yang berkaitan tentang POLITIK ELITE NAHDLATUL ULAMA: KETERLIBATAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian kali ini mempunyai fungsi untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu bagaimana keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020, bagaimana keterlibatan elite Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020, dan keberpihakannya dengan demikian peneliti berharap menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

1.7.2 Tipe Penelitian

Peneliti mengambil penelitian tentang “Politik Elite Nahdlatul Ulama: Keterlibatan dan Keberpihakan dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020”. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dengan menguraikan suatu fakta. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang kemudian akan disusun menjadi data yang spesifik. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang subjek yang diteliti yang disertai dengan pendeskripsian dari kejadian

yang terjadi secara lengkap. Penggunaan deskriptif kualitatif supaya mendapatkan jawaban dari narasumber yang mendalam dan spesifik.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive, teknik ini adalah teknik yang subjeknya merupakan informan yang akan digali informasinya menggunakan teknik wawancara. Sehingga Penelitian ini membutuhkan adanya subjek penelitian yang bersumber dari informan atau narasumber. Berikut adalah daftar informan yang diperlukan dalam pengambilan data antara lain :

1. Rais Syuriah PCNU Kota Surabaya (Kyai Mas Sulaiman)
2. Jajaran struktural PCNU Kota Surabaya, (Kyai Agus selaku Wakil Katib syuriah dan Andri Irawan selaku Wakil Syuriah MWC NU Gubeng)
3. Beberapa Ketua Badan Otonom NU Kota Surabaya, (Hj. Lilik ketua Muslimat, Afif ketua GP Ansor, dan Camelia ketus Fatayat NU Kota Surabaya)
4. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya (Musyafa' Rouf sekaligus Tim pemenangan Mahfud-Mujiaman)
5. Tim pemenangan Eri-Armuji (Bapak Wimbo Ernando)
6. Salah satu ulama pesantren di Sidosermo (Pondok Pesantren An-Najiyah Kyai Mas Yusuf)

Subyek di atas dipilih berdasarkan pertimbangan dimana nantinya subjek tersebut dapat memberikan informasi dan data penelitian. Pemilihan informan oleh peneliti, apabila dirasa informasi yang didapat kurang mencukupi nanti peneliti akan mencari informan lain supaya informasi yang didapat lebih jelas dan lebih lengkap.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksud untuk memberi gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan social yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya Menurut Moleong (2011: 6) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁶. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan. Penelitian yang bersumber dari informan ini kemudian mengkonversikan dan mengolah sebuah data nantinya dengan menggunakan alat bantu seperti rekaman dan dokumentasi secara verbal dan dokumentasi secara visual nantinya (foto). Rekaman ini bertujuan untuk mengantisipasi hilangnya data yang dilaksanakan dengan wawancara langsung dengan informan. Dalam melakukan interview, khususnya melakukan indept interview. Peneliti nanti akan menjelaskan mengenai latar belakang secara umum kepada informan yang hendak memberikan keterangan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang didapat di lapangan nantinya dikumpulkan kemudian diselesaikan dan dianalisis secara kualitatif dengan landasan kerangka teori yang berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Dalam proses analisis pertama, nanti akan dilakukan mapping (pemetaan). Pemetaan nantinya untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi dari temuan data. Kedua, menghubungkan teori dan data yang ada di lapangan.

¹⁶ Tampinongkol, Dipo dkk. 2018. Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kota Bitung pada PILEG 2019. Eksekutif. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No. 1 Tahun 2018

Kesimpulan dari analisis data ini adalah peneliti nantinya akan melaksanakan observasi langsung dan melaksanakan wawancara dimana masing-masing informan kunci dan mengamati langsung keadaan lapangan. Berikutnya hasil wawancara tersebut akan diklasifikasikan juga guna mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti.